



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Menanti Kiprah Wajah Baru Wakil Rakyat
 Tanggal : Kamis, 05 September 2019
 Surat Kabar : Seputar Indonesia
 Halaman : 2

Menanti Kiprah Wajah Baru Wakil Rakyat

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 575 nama anggota DPR RI terpilih yang akan duduk di Senayan dalam lima tahun mendatang. Kemunculan banyak wajah baru memancarkan harapan ada perbaikan kinerja para wakil rakyat.

Berdasarkan data KPU, hampir 50% kursi DPR diisi wajah-wajah baru atau sebanyak 286 orang (49,74%) dari 575. Selama ini kinerja wakil rakyat di Senayan selalu menjadi sorotan publik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menilai kinerja DPR periode 2014-2019 merupakan yang terburuk sejak era Reformasi. Satu di antara indikatornya adalah minim produksi legislatif dan tingkat kehadiran yang sangat buruk.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, pada dasarnya masyarakat sangat menaruh harapan tinggi terhadap para wakil rakyat baru periode lima tahun mendatang. Namun, optimisme juga harus ada alasan. Berkaca pada pengalaman periode sebelumnya, banyak anggota baru tidak menjadi jaminan akan membaiknya performa kerja DPR. "Saya tidak yakin antara yang lama dan yang baru berserienergi. Artinya yang lama berpengalaman dan yang baru-baru masuk belajar. Saya melihatnya adalah kemungkinan besar yang baru ini akan berburu dengan mereka yang lama yang sudah menjadi pemain terlebih dahulu. Saya berkeyakinan tak akan mengubah wajah baru DPR," ungkap Ujang kemarin.

Alasannya, anggota DPR baru dinilai masih miskin pengalaman. Kedua, biasanya setelah mereka menjabat instruksikan membuat dengan budaya lama, terutama dalam permainan anggaran di DPR sehingga sektor legislasi dan pengawasan kerap kali dilupakan. "Wajah-wajah baru yang dulunya ideal, memiliki visi misi dan program

yang baik untuk kerakyatan, justru ketika sudah bergabung, sudah jadi, sudah menikmati berbagai fasilitas, lupa dengan agenda awal mereka yang ideal sehingga fungsi dan kewenangan yang tiga itu ketika sudah duduk dan dilantik itu dilepaskan," urainya.

Tiga kewenangan yang dimiliki baik soal penganggaran, legislasi, dan pengawasan terapakali bukan dimanfaatkan untuk memajukan DPR, tapi justru lebih untuk kepentingan sediri, kelompok, dan partai politiknya.

"Kita berkaca pada periode yang lalu, bagaimana wajah baru ketika itu banyak juga, tapi persoalannya tak mengubah wajah DPR juga. Karena fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting itu bukan didorong untuk menguatkan atau membangun wajah DPR yang modern yang bagus, tetapi lebih pada digunakan dimanfaatkan keuntungan baik yang sifatnya pribadi, kelompok, maupun golongan untuk mengembangkan modal politik yang sudah keleluaran banyak itu," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebenarnya orientasi kinerja DPR bukan sebagai patokan dari undang-undang (UU). Artinya, bukan seberapa banyak UU yang dihasilkan, tapi apakah UU yang dibuatnya benar atau tidak.

membuat. Paling melakukan revisi-revisi, penyesuaian terhadap keadaan, dan sebagainya. Jadi memang undang-undang dan peraturan itu berbahaya. Misalnya orang pakai sepatu pun diatur warnanya apa. Jadi di negara-negara yang sudah established (mapan) undang-undang mereka tak lagi

ini mengatakan bahwa di seluruh dunia soal kehadiran DPR itu yang terpenting adalah koor- run. "Jangan pernah berharap ada 560 anggota itu semua hadir. Oleh karena itu, dibuat aturan kuorum setengah plus 1. Karena ada yang tugas di luar kota, ada yang di luar daerah, ada yang di

luar negeri, ada konferensi, dan lain-lain. Jadi yang penting itu kuorumnya itu. Jadi saya kira cara pandang terhadap parlemen itu yang salah, termasuk institusi yang mengamati parlemen, tapi tak mengerti cara kerjanya padlemen," tuturnya.

Mengenai jumlah anggota

DPR ke depan yang hampir 50% baru, Fadli Zon mengatakan bahwa mereka adalah wakil rakyat yang berangkat dari berbagai macam organisasi dari bawah.

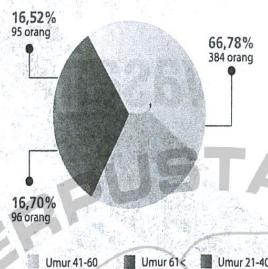
"Kita berharap lebih berkualitaslah ya, tapi dengan sistem yang ada sekarang agak sulit kita berharap terlalu banyak karena akhirnya hanya orang-orang yang mempunyai akses terhadap kekuasaan, modal, yang lolos. Masih banyak aktivis, akademis, yang tidak lolos hanya karena masalah logistik," pungkasnya.

• abdul rochim

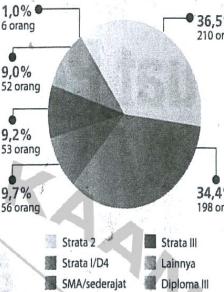
HARAPAN BARU

Sebanyak 575 kursi DPR RI telah terpenuhi. Para wakil rakyat terpilih pun siap melaksanakan amanah sebagai penyambung aspirasi warga negara di bidang legislatif, pengawasan, maupun pengelolaan anggaran.

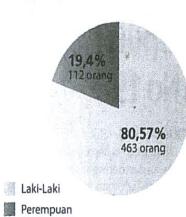
KOMPOSISI USIA



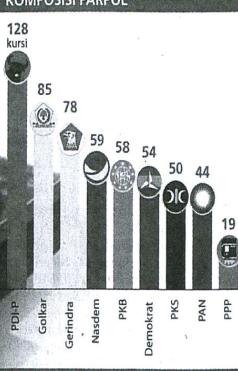
KOMPOSISI PENDIDIKAN



KOMPOSISI GENDER



KOMPOSISI PARPOL



KOMPOSISI PETAHANA-NONPETAHANA

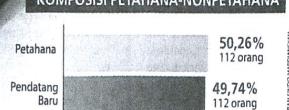


FOTO: DOK. KOMARUDIN/KORANSINDO

KORANSINDO